



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJIP )**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, baik dan berwibawa (*Good Governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR RI Nomor XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Dalam LKJiP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022. Penyusunan LKJiP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*Good Governance*". Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan.

### **I.2. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dilaksanakan dengan mengacu pada semangat memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, serta berupaya meningkatkan pembangunan di perkotaan dan

perdesaan dalam rangka menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah maupun memelihara keseimbangan pembangunan dan penyebaran pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dinas sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan. Dengan mengakomodasikan aspirasi yang berkembang di masyarakat yang mencakup bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Permukiman serta upaya untuk menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang bersih, indah, nyaman dan sehat serta ketersediaan dana yang memadai, sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan profesionalisme dibidang tugasnya.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Daerah Kabupaten Lamongan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan rakyat dan permukiman.

Disamping tugas dinas di atas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dan standar pelayanan minimal (SPM) urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
6. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang serta 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian antara lain:

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sedangkan 3 (tiga) Kepala Bidang yang secara teknis membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya masing-masing meliputi :

1. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Kepala Bidang Cipta Karya
3. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi.

Adapun masing-masing Kepala Bidang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Kepala Seksi yang meliputi:

A. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman:

- 1.) Kepala Seksi Perumahan,
- 2.) Kepala Seksi Kawasan Permukiman,
- 3.) Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas.

B. Kepala Bidang Cipta Karya:

- 1.) Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan,
- 2.) Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman,
- 3.) Kepala Seksi Air Minum.

C. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi:

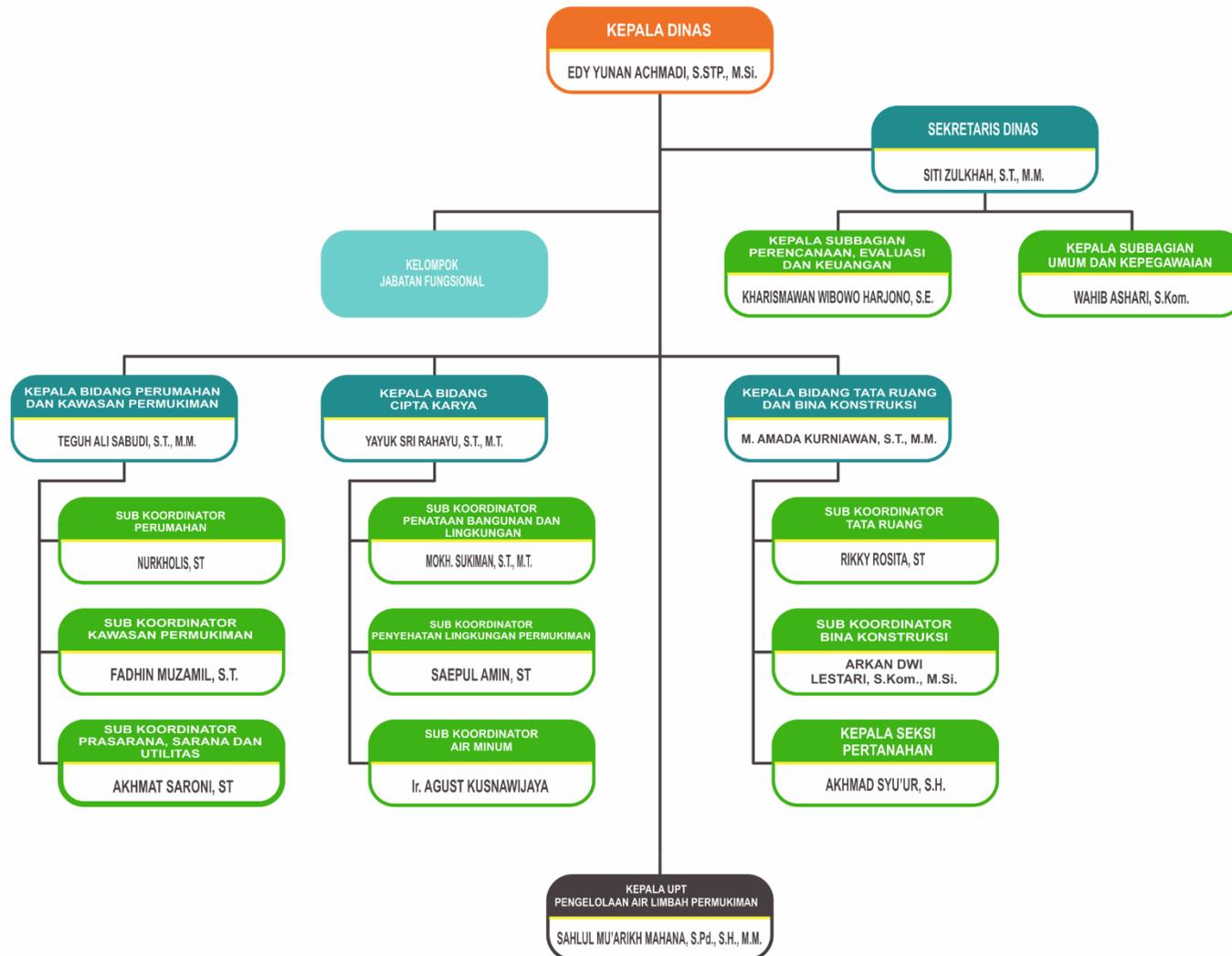
- 1.) Kepala Seksi Tata Ruang
- 2.) Kepala Seksi Bina Konstruksi.
- 3.) Kepala Seksi Pertanahan.

Dalam menjalankan tugas–tugas teknis operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dibantu oleh 1 unsur pelaksana teknis Operasional dilapangan yang terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis IPLT Lamongan.

Untuk memperjelas gambaran Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 58 Th. 2020 dapat dilihat pada bagan berikut ini.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KABUPATEN LAMONGAN



### I.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peran bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam menentukan pembangunan nasional berupa penyediaan sarana dan prasarana dasar yang diarahkan untuk memenuhi, mendukung, dan mengarahkan pembangunan wilayah / kawasan permukiman baik dikawasan perkotaan maupun dipedesaan. Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya ditekankan pada program-program kegiatan yang dapat mendorong adanya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang nyaman, sehat dan terjangkau khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan Kenyamanan bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai multiplier ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga memperbaiki kualitas permukiman.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu:

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota dan desa, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan akses infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi lokal;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja;
- c) Meningkatkan kualitas lingkungan, yang bermaksud untuk mengurangi luas kawasan kumuh, meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman dan meningkatkan pelayanan infrastruktur permukiman.

Untuk mewujudkan tiga *strategic goal* di atas tugas pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya diwujudkan dengan dua pendekatan:

- a) Pendekatan skala kabupaten kota melalui tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b) Pendekatan skala kawasan melalui tugas pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

### I.3.1 Personil

Personil Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan seluruhnya berjumlah 90 personil terdiri 37 PNS, 5 Tenaga Kontrak Bupati dan 48 Tenaga Harian Lepas, dengan rincian sebagai berikut :

▪ Golongan I	=	0	Orang
▪ Golongan II	=	6	Orang
▪ Golongan III	=	26	Orang
▪ Golongan IV	=	5	Orang
Jumlah		<u>37</u>	Orang

Tenaga Kontrak yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati Lamongan berjumlah 5 orang terdiri:

▪ Administrasi Kantor	=	5	Orang
-----------------------	---	---	-------

Sedangkan untuk tenaga harian lepas di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebanyak 48 orang.

▪ Staf / Administrasi Kantor	=	40	Orang
▪ Sopir	=	2	Orang
▪ Penjaga Kantor	=	2	Orang
▪ Petugas Kebersihan Kantor	=	4	Orang
Jumlah		<u>48</u>	Orang

Personil Dinas menurut tingkat pendidikan untuk menunjang tugas-tugas Dinas sampai tahun 2022 meliputi :

- a. PNS
  - Pasca sarjana (S-2) = 8 Orang
  - Sarjana (S-1) = 21 Orang
  - Sarjana Muda (D-III) = 1 Orang
  - SLTA = 7 Orang
- b. Tenaga Kontrak Bupati
  - Sarjana (S1) = 4 Orang
  - SLTA = 1 Orang
  - D3 = 0 Orang
- c. Tenaga Harian Lepas
  - D3 = 2 Orang
  - S1 = 28 Orang
  - SLTA = 17 Orang
  - SLTP = 0 Orang
  - SD = 1 Orang

Untuk memperjelas jumlah jabatan struktural dan staff Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya sesuai dengan pangkat dan pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel I-1 sebagai berikut

**Tabel I-1**  
**Jumlah Jabatan Struktural dan Staf Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Menurut Pangkat dan Pendidikan**

No	Jabatan Struktural	Jml	Jml Pangk. / Gol. Ruang	Jml	Pddk Formal	Jml	Ket
1.	Kepala Dinas						
2.	Sekretaris	1	Pembina Tk. I ( IV/b )	1	S2	1	
3.	Kepala Sub. Bagian	2	Pembina (IV/a)	1	S2	1	
			Penata (III/c)	1	S1	1	
4.	Kepala Bidang	3	Pembina ( IV/a )	2	S2	2	
			Penata (III/c)	1	S2	1	
5.	Kepala Seksi	9	Penata Tk.I ( III/d )	4	S2	1	
					S1	3	
			Penata (III/c)	4	S2	2	
					S1	2	
Penata Muda Tk. I (III/b)	1	S1	1				
6.	Kepala UPT	1	Penata Tk. I (III/d)	1	S1	1	
7.	Staf	23	Penata Tk.I ( III/d )	2	S1	2	
			Penata ( III/c )	1	S1	1	
			Penata Muda ( III/a )	12	S1	11	
					D3	1	
			Pengatur Tk.I ( II/d )	4	SMA	4	
Pengatur ( II/c )	4	SMA	4				

### I.3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tahun 2024 kendaraan operasional bagi pejabat struktural eselon III dan eselon IV yang digunakan untuk kegiatan perencanaan (Survey) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

Adapun sarana dan prasarana dinas terdiri dari :

a. Sarana kendaraan bermotor

1. Kendaraan bermotor roda 4

Jumlah dan jenis kendaraan roda empat pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel I-2**  
**Jenis dan Jumlah Kendaraan Roda Empat**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya**  
**Kabupaten Lamongan**  
**Tahun 2022**

Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
		Baik	Rusak
- Mobil Penumpang	6	6	-
- Mobil Barang	4	4	-

2. Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3

Kendaraan bermotor roda 2 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah sebanyak 19 unit, kendaraan bermotor roda 3 sebanyak 4, semua dalam keadaan baik.

b. Sarana Perkantoran

Jumlah dan jenis sarana perkantoran pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel I-3 dibawah ini.

**Tabel I-3**  
**Jenis dan Jumlah Sarana Perkantoran**  
**Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya**  
**Kabupaten Lamongan**  
**Tahun 2022**

No	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	PC	35	Baik
2	Printer	26	Baik
3	AC	7	Baik
4	Notebook	4	Baik
5	Meja Kayu eselon IV	11	Baik
6	Meja Kayu eselon III	4	Baik
7	Meja Kayu eselon II	1	Baik
8	Proyektor	2	Baik
9	Layar Proyektor	2	Baik
10	Kursi rapat	94	Baik

### **I.3.3 Pembiayaan**

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melalui 14 program dan 28 kegiatan dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 108.886.201.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 92.309.175.999,00 atau 84,78% per 31 desember 2023, sedangkan sisa anggaran tersebut kembali ke kas daerah.

## **I.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJiP**

Sistematika penulisan LKJiP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2022 disusun, sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi :

1. Latar belakang,
2. Tugas pokok, fungsi dan Struktur Organisasi
3. Data umum organisasi

### **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini memaparkan tentang :

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kinerja Tahun 2022
3. Program dan Kegiatan
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini berisi :

1. Capaian Kinerja Organisasi
  - 1.1 Pencapaian kinerja
  - 1.2 Perbandingan realisasi kinerja
  - 1.3 Perbandingan Realisasi kinerja s/d akhir periode RPJMD / Renstra
  - 1.4 Perbandingan Realisasi kinerja dengan realisasi nasional
  - 1.5 Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan
  - 1.6 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya
  - 1.7 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja
2. Realisasi Anggaran

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi :

1. Kesimpulan
2. Saran

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Matriks Rencana Strategik (RS)
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2022
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
4. Lampiran lainnya (Penghargaan, inovasi dll)

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1. RENCANA STRATEGI

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan. Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang undang no. 25 tahun 2004. Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

##### Visi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 10 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Lamongan 2021-2026, Visi Kabupaten Lamongan

***“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”***

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholder's* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif.

##### Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-2021, **“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”** ditempuh melalui 5 (lima) misi. Sebagai Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengemban misi 3 dalam RPJMD yaitu **Misi 3 “Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan”**, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel. 1  
RPJMD Kabupaten Lamongan 2016-2021

Visi	Misi ke 3	Tujuan ke 3	Sasaran
Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan	Mewujudkan Infrastruktur Handal dan Berkeadilan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah yang Ramah Lingkungan	Meningkatnya Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

### II.1.1 Tujuan

Dari sasaran RPJMD Kabupaten Lamongan yang tersebut diatas maka ditetapkan tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah **“Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Permukiman yang Berkualiatas dan Merata“**

### II.1.2 Sasaran dan Indikator Kinerja

Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan

Dimana pada tujuan tersebut mempunyai tiga Sasaran dan empat Indikator Kinerja, untuk lebih jelasnya Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Permukiman yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Permukiman Indeks Air Minum

			Indeks Limbah
			Indeks Drainase
			Indeks IMB
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip DPRKPKK

## II.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh staf, maka akan dijabarkan sebagai berikut :

### **Strategi dan Kebijakan :**

Seperti diuraikan dalam subbab sebelumnya, dalam rangka pencapaian tujuan dalam pengembangan bidang Perumahan dan Permukiman diperlukan strategi dan kebijakan. Langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebagai berikut :

Strategi :

1. Mensinergikan kegiatan OPD dengan Stakeholder lain dalam peningkatan rumah layak huni
2. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak
3. Mensosialisasikan Program rumah tangga sehat kepada khalayak masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
4. Mengoptimalkan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Lamongan
5. Menyusun Rencana Detail Tata Ruang per kecamatan
6. Mengoptimalkan kenaikan jumlah tanah Pemkab yang bersertifikat

Arah / tindakan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendukung misi Kabupaten Lamongan adalah :

1. Perbaiki rumah tidak layak huni

2. Kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU
3. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunia
4. Pembangunan Sistem Drainase
5. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
6. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
7. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
8. Penataan Bangunan dan Lingkungan

Secara singkat, Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya yang lebih detail memuat program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel lampiran.

**Tabel II-1**  
**Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	77,91	80,71
		Indeks Air Minum	78,14	78,85
		Indeks Limbah	82,63	82,69
		Indeks Drainase	74,00	77,43
		Indeks IMB	80,42	82,64
		Indeks Permukiman	74,36	81,95
		Persentase Rumah yang terlayani SPAM	53,53%	55,43%
		Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	71,96%	72,21%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023	
			Target	Realisasi
		Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	70%	73,33%
		Persentase drainase dalam kondisi baik	35,45%	47,63%
		Rasio Kepatuhan IMB	62,29%	71,99%
		Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	5,03%	5,13%
		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	43,86%	64,00%
		Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	77,13%	77,37%
		Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%
		Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	100%	100%
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	9,18%	67,23%
		Persentase Rumah Layak Huni	70,52%	70,74%
		Persentase pemenuhan rumah korban bencana	54,84%	41,94%
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	61,10%	62,91%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023	
			Target	Realisasi
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	89,17	88,39 (TW 2)
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	82,96

### II.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Perumahan di Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran 2023 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya melalui 14 program dan 28 kegiatan. Adapun program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Program/kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai IKM Internal DPRKPCK</b>	<b>7.938.552.000</b>	<b>7.528.059.592</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi yang benar dan tepat waktu	107.720.000	107.483.700
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi keuangan yang dilaksanakan	4.804.636.380	4.500.726.928
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	242.000.000	241.329.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi umum yang dilaksanakan	483.719.620	472.432.053
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang disediakan	160.000.000	159.450.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	1.755.476.000	1.662.645.832
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	385.000.000	383.992.079
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Rumah yang terlayani SPAM</b>	<b>13.031.692.000</b>	<b>10.070.843.463</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang terlayani SPAM	13.031.692.000	10.070.843.463
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia</b>	<b>2.585.035.000</b>	<b>2.584.800.950</b>
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPS-3R yang dibangun / dipelihara	2.585.035.000	2.584.800.950
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik</b>	<b>2.270.752.000</b>	<b>2.219.213.450</b>

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang terbangun	2.270.752.000	2.219.213.450
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase drainase dalam kondisi baik</b>	<b>3.585.000.000</b>	<b>3.382.226.900</b>
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran drainase / Gorong-gorong perkotaan yang kondisi baik	3.585.000.000	3.382.226.900
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Rasio Kepatuhan IMB</b>	<b>11.715.830.000</b>	<b>8.165.049.410</b>
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan gedung yang terbangun, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diterbitkan	11.715.830.000	8.165.049.410
<b>7</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>	<b>1.045.500.000</b>	<b>683.686.200</b>
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang tertangani	1.045.500.000	683.686.200
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>	<b>134.660.000</b>	<b>129.901.000</b>

	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	134.660.000	129.901.000
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang</b>	<b>1.710.000.000</b>	<b>1.417.751.269</b>
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah substansi rencana tata ruang yang disetujui	532.000.000	431.500.569
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah substansi rencana tata ruang yang disetujui	878.000.000	686.473.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah informasi penataan ruang	300.000.000	299.777.700
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Persentase pemenuhan rumah korban bencana</b>	<b>1.349.400.000</b>	<b>1.240.728.000</b>
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah korban bencana dan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah	50.000.000	49.858.000
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pokja / Satgas, Tim pendamping dan Fasilitator yang dibentuk dan terlatih	50.000.000	49.500.000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten yang sudah terbangun atau diperbaiki	200.000.000	199.902.000

	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus yang dibina pengelolaannya	825.000.000	718.463.000
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dikeluarkan	224.400.000	223.005.000
<b>11</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani</b>	<b>2.992.000.000</b>	<b>2.832.491.365</b>
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	105.000.000	78.712.972
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	855.000.000	757.899.500
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	2.032.000.000	1.995.878.893
<b>12</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>	<b>60.377.780.000</b>	<b>51.920.588.600</b>
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	60.377.780.000	51.920.588.600

13	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</b>	<b>75.000.000</b>	<b>73.530.100</b>
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	105.000.000	93.655.000
14	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</b>	<b>45.000.000</b>	<b>40.180.800</b>
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen fasilitasi penyelesaian ganti rugi sengketa tanah	45.000.000	40.180.800

#### II.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari Kepala Dinas kepada Bidang atau seksi atau pelaksana yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Penetapan kinerja ini adalah amanah yang tertuang dalam Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, penetapan kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Penetapan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2023 ini hanya terkait dengan sasaran strategis saja atau **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, bukan keseluruhan Program / Kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023, karena tidak seluruh Program / Kegiatan bisa menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan dasar sarana dan prasarana yang tersedia. Berikut dapat dijabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Tahun Anggaran 2023. Tabel dibawah ini merupakan tabel pengukuran kinerja hanya berdasarkan pada Indikator Kinerja Utama, untuk pengukuran kinerja keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dapat dilihat pada lampiran.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya guna meningkatkan kinerja organisasi.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Permukiman yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Permukiman
			Indeks Air Minum
			Indeks Limbah
			Indeks Drainase
		Indeks IMB	
		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip DPRKPCK

Adapun pencapaian kinerja setiap yang dikelompokkan berdasarkan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

## I. Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	77,91	80,71	103,60%
		Indeks Air Minum	78,14	78,85	100,91%
		Indeks Limbah	82,63	82,69	100,07%
		Indeks Drainase	74,00	77,43	104,64%
		Indeks IMB	80,42	82,64	102,76%
		Indeks Permukiman	74,36	81,95	110,21%
		Persentase Rumah yang terlayani SPAM	53,53%	55,43%	103,54%
		Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	71,96%	72,21%	100,36%
		Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	70,00%	73,33%	104,76%
		Persentase drainase dalam kondisi baik	35,45%	47,63%	134,36%
		Rasio Kepatuhan IMB	62,29%	71,99%	115,56%
		Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	5,03%	5,13%	101,95%
		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	43,86%	64,00%	145,93%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
		Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	77,13%	77,37%	100,32%
		Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100,00%
		Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	100%	100%	100,00%
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	9,18%	67,23%	732,03%
		Persentase Rumah Layak Huni	70,52%	70,74%	100,32%
		Persentase pemenuhan rumah korban bencana	54,84%	41,94%	76,47%
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	61,10 %	62,91%	102,88%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	89,17	88,39 (TW 2)	99,13%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	82,5	82,96	100,56%

## II. Perbandingan Realisasi Kinerja

Sedangkan untuk perbandingan Prosentase capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya, dapat disajikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
			2022	2023
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	102,52%	103,60%
		Indeks Air Minum	100,51%	100,91%
		Indeks Limbah	100,04%	100,07%
		Indeks Drainase	104,19%	104,64%
		Indeks IMB	102,34%	102,76%
		Indeks Permukiman	105,97%	110,21%
		Persentase Rumah yang terlayani SPAM	103%	103,54%
		Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	100,22%	100,36%
		Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	100%	104,76%
		Persentase drainase dalam kondisi baik	133%	134,36%
		Rasio Kepatuhan IMB	114%	115,56%
		Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	101%	101,95%
		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	141%	145,93%
		Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	100,00%	100,32%
Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,00%	100,00%		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	
			2022	2023
		Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan	100,00%	100,00%
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	600%	732,03%
		Persentase Rumah Layak Huni	100,37%	100,32%
		Persentase pemenuhan rumah korban bencana	80,00%	76,47%
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	101,62%	102,88%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	98,82%	99,13%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	100,82%	100,56%

### III. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD / Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENSTRA (2021-2026)	REALISASI KINERJA(2021-2023)	CAPAIAN (2021-2023)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman	Indeks Infrastruktur Dasar dan Permukiman	79,09	80,71	102,04%
		Indeks Air Minum	78,87	78,85	99,97%
		Indeks Limbah	82,67	82,69	100,02%
		Indeks Drainase	76,31	77,43	101,47%
		Indeks IMB	81,90	82,64	100,90%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENSTRA (2021-2026)	REALISASI KINERJA(2021-2023)	CAPAIAN (2021-2023)
1	2	3	4	5	6
		Indeks Permukiman	75,73	78,32	103,42%
		Persentase Rumah yang terlayani SPAM	55,51%	55,43%	99,85%
		Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik	72,10%	72,21%	100,15%
		Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia	100,00%	73,33%	73,33%
		Persentase drainase dalam kondisi baik	45,54%	47,63%	100,59%
		Rasio Kepatuhan IMB	68,76%	71,99%	104,70%
		Persentase Penataan bangunan dan lingkungan	7,63%	5,13%	67,23%
		Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	64,00%	64,00%
		Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang	77,30%	77,37%	100,10%
		Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA RENSTRA (2021-2026)	REALISASI KINERJA(2021-2023)	CAPAIAN (2021-2023)
1	2	3	4	5	6
		untuk pembangunan			
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	18,37%	67,23%	365,98%
		Persentase Rumah Layak Huni	70,76%	70,74%	99,97%
		Persentase pemenuhan rumah korban bencana	100%	41,94%	41,94%
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	62,46%	62,91%	100,72%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip	89,19	88,39 (TW 2)	99,10%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	83,5	82,96	99,35%

Berdasarkan data diatas realisasi kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami **Kenaikan**. Hal ini didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh :

1) Persentase Rumah yang terlayani SPAM

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh :

- a. Program Pembangunan dan Peningkatan SPAM Jaringan perpipaan Pedesaan sebanyak 2.505 SR.

2) Persentase akses layanan pengolahan air limbah domestik

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh :

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
  - b. Pembangunan IPAL Komunal di 3 Lokasi, yakni di Desa Bedingin Kecamatan Sugio, Desa Gebangangkrik Kecamatan Ngimbang, Sesa Sewor Kecamatan Sukorame
  - c. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 3) Persentase sarana dan prasarana persampahan yang tersedia

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh :

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
  - b. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di 4 Lokasi, yakni di Desa Bluluk Kecamatan Bluluk, Desa Drujugurit Kecamatan Ngimbng, Desa Pangean Kecamatan Maduran, Desa Pataan Kecamatan Sambeng
- 4) Persentase drainase dalam kondisi baik

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh:

- a. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di 16 lokasi, yakni di IKK Sugio (Depan Kantor Kecamatan), IKK Sukorame, IKK Turi, Jalan Andansari, Jalan Kombespol M Duryat, Jalan Kinameng, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Kusuma Negara, Jalan Kyai amin, Jalan Merpati, Jalan Pahlawan, Jalan Soemargo, Jalan Soewoko, Jalan Sunan Kalijogo, Jalan Veteran, Kel. Banaran Kecamatan Babat
  - b. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
- 5) Rasio Kepatuhan IMB

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh IMB/PBG sebanyak 137 Izin

- 6) Persentase Penataan bangunan dan lingkungan

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh RTBL Jalan Lingkar Utara seluas 123 Ha.

- 7) Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis sebanyak 157 orang.

- 8) Prosentase kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Penambahan Luas lahan yang sesuai RTRW seluas 535,75 Ha.

9) Persentase sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Jumlah sengketa tanah Garapan yang ditangani sebanyak 5 sengketa.

10) Persentase penyelesaian santunan atas kerugian tanah untuk pembangunan

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Jumlah penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan sebanyak 1 santunan.

11) Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani

Realisasi kinerja tahun 2023 didukung oleh program-program yang dititikberatkan di lokasi kumuh sesuai Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor : 188/365/Kep/413.013/2020 tanggal 2 Nopember 2020, yaitu :

a. Program Kawasan Permukiman sumber dana APBD

Program-program strategis yang pendanaannya berasal dari : APBD Provinsi, APBN dan Dana Desa

12) Persentase Rumah Layak Huni

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022, hal tersebut didukung oleh :

a. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) dengan sumber dana APBN, dengan hasil kegiatan memperbaiki 39 rumah.

b. Program bedah rumah pendanaan dari APBD, dengan hasil kegiatan memperbaiki 100 rumah.

Sehingga peningkatan pada jumlah rumah layak huni yang tercapai sebanyak 139 rumah

13) Persentase pemenuhan rumah korban bencana

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Jumlah rumah korban bencana yang tertangani sebanyak 15 rumah.

14) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

Realisasi kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan, hal ini didukung oleh Jumlah rumah yang terfasilitasi PSU Jalan sebanyak 5.158 rumah dan Jumlah rumah yang terfasilitasi PSU Drainase Lingkungan sebanyak 2.175 rumah.

#### IV. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut oleh Pemerintah Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan bertanggung jawab atas 2 SPM yaitu Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat. Berikut perbandingan antara target nasional dengan realisasi yang telah dicapai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tahun 2023 :

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target Nasional 2023	Realisasi Kinerja 2023
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100 %	100 %
3	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
4	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%

Dari 4 indikator SPM tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari bisa tercapai 100% dari target yang ditetapkan karena ditunjang dari rumah tangga pengguna air bersih melalui jaringan perpipaan yang disediakan PDAM, Hippams, PJT dan Pamsimas dan non perpipaan yang diusahakan sendiri oleh masyarakat melalui sumber air Sumur Bor/Perpipaan, Sumur Tak Terlindungi, Mata Air Tak Terlindungi, Air Permukaan dan Air Hujan.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah bisa tercapai 100% dari target yang ditetapkan, karena ditunjang oleh 1 IPLT, 92 IPAL serta Sub Sistem Pengolahan Setempat yang diusahakan sendiri oleh masyarakat.

3. Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota untuk tahun 2023 sebanyak 15 rumah.
4. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk tahun 2023 belum ada kegiatan relokasi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah daerah.

#### **V. Analisis Penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan**

Analisis kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya adalah sebuah proses penilaian secara sistematis dengan tujuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk kemudian diperbaiki atau ditingkatkan demi tercapainya visi atau misi ke 3 RPJMD.

Berdasarkan evaluasi kinerja yang diolah dari Formulir PKK dan PPS diperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2023 beberapa Program dan Kegiatan telah memberikan Kontribusi kepada Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan. Namun mengingat anggaran yang terbatas dan kurangnya sumberdaya manusia yang berkompeten dibidangnya, maka tidak semua sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tahun 2016-2021 dapat dilaksanakan.

Analisis kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai sasaran yang pertama yaitu Meningkatnya Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Permukiman dengan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  
Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:  
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM; Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; dan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan.
  - 2) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional  
Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:  
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota;

Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS; dan Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota; Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; dan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.

5) Program Penataan Bangunan Gedung

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG; Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota; Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Kabupaten/Kota; Penilikan terhadap Penyelenggaraan bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan; dan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi.

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota; dan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.

7) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi; Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi; dan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

8) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah; dan Sistem Informasi Penataan.

9) Program Pengembangan Perumahan

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota; Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana; Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana; Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun; Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

10) Program Kawasan Permukiman

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh; Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh; Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni; dan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU.

Serta didukung oleh kegiatan strategis yang berasal dari :

- a. Dana Alokasi Khusus
- b. Bedah Rumah dengan dana APBD
- c. Program Perumahan Terjangkau dari Kementerian PUPR (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan)
- d. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementarian PUPR
- e. Kegiatan penanganan kawasan kumuh dengan lokasi sesuai SK Bupati No. 188/356/Kep/413.013/2020 dengan pendanaan dari Kementerian PUPR

11) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

## 12) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah.

## 13) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah:

Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## 2. Untuk mencapai sasaran yang kedua yaitu Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan melaksanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan forum OPD sebagai sarana menjaring aspirasi masyarakat
- 2) Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja, serta penyusunan perencanaan program kegiatan
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran
- 4) Meningkatnya penatausahaan administrasi yang akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja
- 5) Meningkatnya komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah propinsi maupun pusat
- 6) Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor untuk operasional sehari-hari
- 7) Pemenuhan kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan untuk operasional sehari hari

## VI. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Prosentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 92.309.175.999,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 108.886.201.000,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 15,22 %.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan yaitu proses perencanaan dan pengawasan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai tenaga survei dan kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan kegiatan strategis di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

## **VII. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau pun Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 14 program, 28 kegiatan, dan 65 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan dibawah ini.

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum  
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13.061.692.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 10.070.843.463,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 77,28%. Hasil yang dicapai :
  - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
  - 2) Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM
  - 3) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
  - 4) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional  
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.585.035.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.584.800.950,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,99 %. Hasil yang dicapai :
  - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
  - 2) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
  - 3) Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah  
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.270.752.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.219.213.450,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,73 %. Hasil yang dicapai :
  - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
- 3) Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
- 4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase  
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.585.000.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.382.226.900,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,34 %. Hasil yang dicapai :
  - 1) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
  - 2) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung  
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 11.715.830.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 8.165.049.410,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 69,69 %. Hasil yang dicapai :
  - 1) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
  - 2) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara Kabupaten/Kota
  - 4) Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
  - 5) Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya  
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.045.500.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 683.686.200,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 65,39 %. Hasil yang dicapai :
  - 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
  - 2) Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi  
Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 134.660.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 129.901.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,47 %. Hasil yang dicapai :
  - 1) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- 2) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.710.000.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.417.751.269,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 82,91%. Hasil yang dicapai :

- 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (Pendampingan Persetujuan Substansi RDTR BWP Lamongan)
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
- 3) Sistem Informasi Penataan Ruang

9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.938.552.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 7.528.059.592,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,83%. Hasil yang dicapai :

- 1) Penyelenggaraan forum OPD sebagai sarana menjaring aspirasi masyarakat
- 2) Penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja, serta penyusunan perencanaan program kegiatan tahun 2024 dan tahun 2023
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi perkantoran,
- 4) Meningkatnya penatausahaan administrasi yang akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja
- 5) Meningkatnya komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah propinsi maupun pusat
- 6) Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor untuk operasional sehari-hari
- 7) Pemenuhan kegiatan pemeliharaan rutin kendaraan untuk operasional sehari hari

10. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.349.400.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.240.728.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,95 %. Hasil yang dicapai :

- 1) Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 2) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
- 3) Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

- 4) Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
- 5) Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

11. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.992.000.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.832.491.365,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 94,67%. Hasil yang dicapai :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
- 2) Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
- 3) Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- 4) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- 5) Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

12. Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 60.377.780.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 51.920.588.600,00 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 85,99 %. Hasil yang dicapai :

- 1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

13. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 105.000.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 93.655.000,00 dengan realisasi program sebesar 100% dan realisasi keuangan 89,20%. Hasil yang dicapai :

- 1) Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah

14. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan suntunan Tanah

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 40.180.800,00 dengan realisasi program sebesar 100% dan realisasi keuangan 89,29%. Hasil yang dicapai :

- 1) Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Alokasi anggaran dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas rutin Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kabupaten Lamongan yang bersumber pada APBD. Program Kegiatan Tahun 2023 yang telah di anggarkan dapat dilihat pencapaian sasaran pada uraian dibawah ini.

### **I. Akuntabilitas Keuangan**

#### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN**

##### **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 13,031,692,000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 4 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,070,843,463.00, atau 77.28% dari pagu anggaran

##### **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional**

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 2,585,035,000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 3 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,584,800,950.00 atau 99,99% dari pagu anggaran

##### **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 2,270,752,000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 4 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,219,213,450.00 atau 97,73% dari pagu anggaran

##### **Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 3,585,000,000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 2 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,382,226,900.00 atau 94.34% dari pagu anggaran.

##### **Program Penataan Bangunan Gedung**

Program Penataan Bangunan Gedung mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 11,715,830,000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 5 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8,165,049,410.00, atau 69.69% dari pagu anggaran.

##### **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**

Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 1,045,500,000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 2 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 683,686,200.00, atau 65.39% dari pagu anggaran.

#### **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Program Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 134,660,000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 3 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 129,901,000.00, atau 96.47% dari pagu anggaran.

#### **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 1,710,000,000.00 dipergunakan untuk 3 kegiatan 4 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,417,751,269.00 atau 82.91% dari pagu anggaran.

### **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

#### **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai alokasi dana sebesar Rp 7,938,552,000.00 dipergunakan untuk 7 kegiatan 24 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7,528,059,592.00, atau 94.83% dari pagu anggaran.

#### **Program Pengembangan Perumahan**

Program Pengembangan Perumahan mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 1,349,400,000.00 dipergunakan untuk 5 kegiatan 6 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1,240,728,000.00, atau 91.95% dari pagu anggaran.

#### **Program Kawasan Permukiman**

Program Kawasan Permukiman mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 2,992,000,000.00 dipergunakan untuk 3 kegiatan 5 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2,832,491,365.00, atau 94.67% dari pagu anggaran.

#### **Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)**

Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 60,377,780,000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 1 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51,920,588,600.00, atau 85.99% dari pagu anggaran.

## **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**

### **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 105,000,000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 2 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93,655,000.00, atau 89.20% dari pagu anggaran.

### **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan**

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Pembangunan mempunyai alokasi dana sebesar Rp. 45,000,000.00 dipergunakan untuk 1 kegiatan 2 sub kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40,180,800.00, atau 89.29% dari pagu anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

### **IV.1 KESIMPULAN**

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab Lamongan Tahun 2023 diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Telah di sampaikan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat dan telah dilakukan peningkatan kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan tahun 2023.
- Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya pada tahun 2023 merupakan media akuntabilitas yang memberikan informasi pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan
- Hasil pengukuran Kinerja pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan pada tahun 2023 termasuk kategori sangat baik.
- Telah dapat diketahui indikator keberhasilan dari prosentase capaian kinerja pada setiap sasaran.
- Telah dapat diketahui faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor-faktor penyebab kegagalan suatu kegiatan.
- Dapat dibuat bahan acuan untuk pengambilan keputusan serta kebijaksanaan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan pada tahun berikutnya.

Pada akhir penulisan kami tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang disusun oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2023 masih memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan sumber daya manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya, yang mempengaruhi. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan organisasi dimasa-masa yang akan datang dan secara kesinambungan melalui peningkatan kinerja semua unsur organisasi yang mempengaruhi baik secara tim, individu, maupun institusi sebagai wadah organisasi.

## IV.2 SARAN

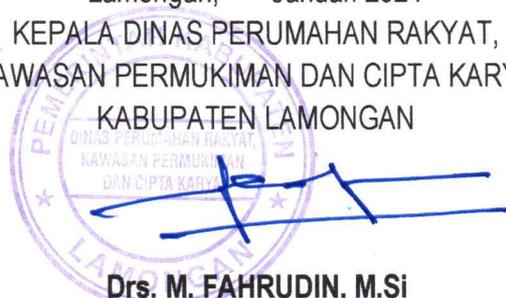
Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) ini diharapkan sebagai alat pemicu bagi seluruh pihak yang terlibat pada Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk lebih meningkatkan aktifitas dan kreatifitas sebagai seorang pegawai negeri, meningkatkan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban visi dan misi organisasi untuk menuju aparatur pemerintah yang profesional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP) merupakan suatu kewajiban Kepala Dinas dalam memimpin suatu organisasi untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan faktor-faktor pendukungnya atau suatu tindakan/pernyataan kejadian pihak lain yang berkepentingan untuk menjelaskan hasil seluruh tindakan dalam jangka waktu tertentu. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.

Adapun saran dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektoral serta berbagai upaya untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat.
- Berhasil dan berlangsungnya suatu organisasi dengan baik, memerlukan dukungan data yang akurat, tepat waktu dan lengkap. Sistem pencatatan dan pelaporan yang sudah ada perlu lebih dimantapkan dan perlu dipikirkan pengembangan sistem pelaporan sesuai kebutuhan.
- Untuk meningkatkan keberhasilan program, cakupan dan kualitas pelayanan serta mengantisipasi segala dampak pembangunan perlu strategi dan inovasi baru dalam mengendalikan dan menghadapi masalah.
- Sumber daya manusia (tenaga) perlu terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, serta disesuaikan dengan kemajuan IPTEK dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Lamongan, Januari 2024  
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,  
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA  
KABUPATEN LAMONGAN



**Drs. M. FAHRUDIN, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710424 199101 1 001